



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN PENERIMAAN DELEGASI
PERWAKILAN PESERTA PERTEMUAN NASIONAL WARIA**

KAMIS, 22 JANUARI 2009

I. PENDAHULUAN

Sekitar 25 orang perwakilan waria yang sedang mengadakan Pertemuan Nasional Waria Seluruh Indonesia yang berlangsung tanggal 18 s.d 23 Januari di Bogor, Jawa Barat datang ke Komisi IX DPR-RI untuk menyampaikan beberapa hasil pertemuan yang sedang mereka laksanakan.

Kedatangan mereka ke Komisi IX DPR-RI dipimpin oleh Yulie Rettob (Ketua Forum Waria Seluruh Indonesia) yang beranggotakan sekitar 7 juta orang yang tersebar di 25 provinsi diseluruh Indonesia. Kedatangan mereka diterima Sonny Soemarsono (Ketua Pokja Nakertrans), didampingi Ir. Rudianto Tjen dan H. Rustam Effendi.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN :

Kepada Komisi IX DPR-RI mereka menyampaikan beberapa tuntutan dan harapannya, antara sebagai berikut :

1. Bahwa keberadaan komunitas dan status waria adalah tetap merupakan Warga Negara RI, dimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Setiap Warga Negara Indonesia memiliki kesamaan hak dan kewajiban dengan sesama warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, yang terjadi selama ini adalah komunitas waria memperoleh perlakuan berbeda (diskriminasi) dari pemerintah, misalnya : Hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pelayanan kependudukan, kebebasan memperoleh hak sosial kemasyarakatan lainnya.

Dalam hal mendapatkan peluang untuk memperoleh pekerjaan, komunitas waria tidak mempersoalkan gender tetapi agar diberikan peluang untuk memperoleh pekerjaan sesuai skill yang mereka miliki.

2. Dengan adanya berbagai perlakuan diskriminasi yang dilakukan terhadap komunitas waria maka para waria meminta DPR-RI untuk mengambil langkah-langkah sbb. :

- a. DPR-RI segera membuat Undang-undang Anti Diskriminasi yang didasarkan pada cakupan dimensi yang luas dan disebutkan secara eksplisit.
 - b. DPR-RI agar mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Optional Protocol dari Konvensi Anti Penyiksaan (CAT).
3. Menyikapi prevalensi penyebaran penyakit HIV/AIDS dikalangan kaum waria, yang jumlahnya terus semakin meningkat sehingga menduduki posisi tertinggi di Asia, Pernas Waria I merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :
- a. Meminta DPR-RI mendesak Presiden untuk menyatakan HIV/AIDS adalah masalah darurat Negara.
 - b. Meminta DPR-RI mendesak pemerintah untuk meningkatkan anggaran dalam APBN untuk penanggulangan HIV/AIDS secara berkelanjutan.
 - c. Meminta agar pemerintah segera meningkatkan status KPA (Komite Penanggulangan AIDS) menjadi Komisi yang diketuai langsung oleh Presiden.

III. TANGGAPAN/SARAN :

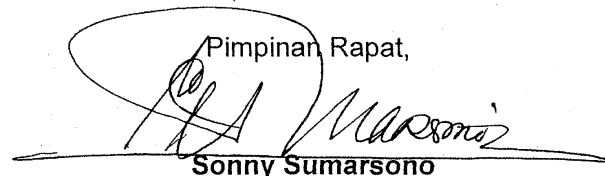
Setelah mendengarkan berbagai tuntutan dan harapan dari perwakilan komunitas Waria, Komisi IX DPR-RI menanggapi dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR-RI mendukung perjuangan komunitas kaum waria didalam memperjuangkan status kewariaannya agar status mereka dapat diakui dan bersama-sama dapat hidup ditengah-tengah masyarakat.
2. Komisi IX DPR-RI akan terus berupaya memperjuangkan kaum waria untuk bisa diakui statusnya dalam memperoleh pekerjaan sesuai skill yang dimiliki, dengan mengajak perwakilan mereka bersama-sama Komisi IX DPR-RI untuk menemui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka menanyakan tindak lanjut atas janji Menakertrans RI dalam Raker Komisi IX DPR-RI dengan Menakertrans RI beberapa waktu yang lalu (mwnngwnai waktu akan diatur kemudian).
3. Khusus mengenai usulan permintaan obat-obatan untuk penyakit kelamin yang sangat rentan diderita oleh kaum waria, Komisi IX DPR-RI menyampaikan informasi bahwa DPR-RI dan Menteri Kesehatan telah menyediakan anggaran untuk mendanai hal tersebut. Untuk itu Departemen Kesehatan telah merealisasikannya dengan menyediakan obat-obatan sebagaimana yang diminta oleh komunitas kaum waria.

Pertemuan ditutup pukul 11.30 WIB

Jakarta, 22 Januari 2009

Pimpinan Rapat,



Sonny Sumarsono